

ABSTRAK

PENGARUH *FRAUD HEXAGON* TERHADAP KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BANYUASIN

Aisyah, 2026 (xiv + 91 halaman)

Email : aisyah4703@gmail.com

Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap menjadi tantangan berkelanjutan yang mengikis akuntabilitas publik, melemahkan tata kelola kelembagaan, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh enam dimensi Teori *Fraud Hexagon* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Banyuasin, Indonesia. Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan kepada pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan. Sampel akhir terdiri dari 126 responden yang dipilih melalui metode purposive sampling, yang mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja), dan Pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kecurangan pengadaan, yang mengindikasikan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal dan pengawasan memberikan peluang terbesar bagi terjadinya praktik kecurangan. Sebaliknya, arogansi menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan kecurangan pengadaan, yang menyiratkan bahwa pejabat dengan visibilitas organisasi yang lebih tinggi mungkin menghadapi pengawasan dan tuntutan akuntabilitas yang lebih ketat. Sementara itu, tekanan, rasionalisasi, kapabilitas, dan kolusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pengadaan. Model struktural ini menjelaskan 76,7% varians dalam kecurangan pengadaan, yang menunjukkan daya penjas yang substansial. Temuan ini memperluas penerapan empiris Teori *Fraud Hexagon* di sektor publik serta menyoroti pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan guna mengurangi kecurangan pengadaan di instansi pemerintah daerah.

Kata kunci: *Arogansi; Fraud Hexagon; Peluang; Kecurangan Pengadaan; Sektor Publik*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE FRAUD HEXAGON ON PROCUREMENT FRAUD IN BANYUASIN REGENCY

Aisyah, 2026 (xiv + 91 halaman)

Email : aisyah4703@gmail.com

Public procurement fraud remains a persistent challenge that undermines public accountability, weakens institutional governance, and causes substantial financial losses. This study aims to examine the influence of the six dimensions of the Fraud Hexagon Theory pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion on public procurement fraud in Banyuasin Regency, Indonesia. A quantitative research approach was employed using primary data collected through structured questionnaires administered to government officials directly involved in procurement activities. The final sample consisted of 126 respondents selected through purposive sampling, including Commitment-Making Officials, Procurement Officials, Selection Working Groups, and Public Procurement Unit personnel. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The findings reveal that opportunity has a positive and statistically significant effect on public procurement fraud, indicating that weaknesses in internal controls and supervision provide the greatest opportunity for fraudulent practices. In contrast, arrogance demonstrates a significant negative relationship with procurement fraud, suggesting that officials with greater organizational visibility may be subject to stronger scrutiny and accountability. Meanwhile, pressure, rationalization, capability, and collusion do not significantly influence procurement fraud. The structural model explains 76.7% of the variance in procurement fraud, indicating substantial explanatory power. These findings extend the empirical application of the Fraud Hexagon Theory within the public sector and highlight the importance of strengthening internal control systems, enhancing transparency, and reinforcing oversight mechanisms to reduce procurement fraud in local government institutions.

Keywords : Arrogance; Fraud Hexagon; Opportunity; Procurement Fraud; Public Sector